

Peran Stabilitas Ketahanan Pangan sebagai Salah Satu Bentuk Tolak Ukur Keamanan di Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid -19

(The Role Of Food Security Stability As A Form Of Safety Measurements In Community During The Covid-19 Pandemic)

Dwi Atmoko & Rona Apriana Fajarwati
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
e-mail: dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id &
rona.apriana18@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract

Food security is a very important thing in people's lives. Good food security will lead to a good social order as well. During the COVID-19 pandemic, the Indonesian state experienced a slump in various fields, which resulted in Indonesia's economic growth experiencing a significant decline. The stability of food security with the transmission of the COVID-19 virus outbreak experienced obstacles and disruptions, starting from the inhibition of food production, distribution and production transportation, including production support equipment which resulted in serious food availability problems. The Indonesian government in dealing with this pandemic outbreak has issued regulations or policies to suppress the spread of the COVID-19 virus by issuing Large-Scale Social Restrictions, but the impact or effect it causes is that many industrial sectors have finally closed their businesses, be it from the hotel, restaurant sector. or tourism, as well as malls or retail which in turn has an impact on the reduction of labor and the departure of industrial players. The benchmark for food security is highly dependent on the surrounding environment, both national and international domestic factors. If the two environments give a good effect, of course, food security will be achieved well. And vice versa if the environment is not good, then what will arise is food and other problems that surround it, including food sufficiency. Poor food security, especially for poor families ' food security is the emergence of negative actions such as crime and the like. The government in dealing with this problem has issued a quick policy by carrying out a program of economic recovery and transformation with the issuance of Presidential Regulation Number 82 of 2020 concerning the Corona Virus (COVID -19) Management Committee and National Economic Recovery whose aim is expected to restore existing economic conditions in order to achieve growth. stable and equitable economy in all lines of people's lives.

Keywords: *Stability, Food Security, COVID-19*

Abstrak

Ketahanan Pangan atau food security merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Ketahanan pangan yang baik akan membawa kepada kehidupan tatanan masyarakat yang baik pula. Pada masa pandemi COVID-19 negara Indonesia mengalami keterpurukan diberbagai bidang, yang mengakibatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Stabilitas ketahanan pangan dengan adanya penularan wabah virus COVID-19 mengalami hambatan dan gangguan, yang dimulai dari terhambatnya produksi pangan, distribusi dan transportasi produksi, termasuk alat-alat penunjang produksi yang mengakibatkan kesediaan akan pangan mengalami kendala yang serius. Pemerintah Indonesia dalam menangani wabah pandemi ini telah mengeluarkan regulasi atau kebijakan guna menekan penyebaran virus COVID-19 ini dengan mengeluarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, akan tetapi dampak atau efek yang ditimbulkannya adalah banyaknya bidang Industri yang akhirnya menutup usahanya, baik itu dari sektor perhotelan, restoran atau pariwisata, serta mall atau ritel yang pada akhirnya berdampak pada pengurangan tenaga kerja dan perginya pelaku industri. Tolak ukur ketahanan pangan sangat tergantung pada lingkungan sekitarnya baik itu faktor domestik nasional maupun internasional. Apabila kedua lingkungan tersebut memberikan efek yang baik tentunya ketahanan pangan akan tercapai dengan baik. Begitu pula sebaliknya apabila lingkungan tersebut tidak baik, maka yang akan timbul adalah masalah pangan dan lain-lain yang melingkupinya, termasuk juga akan kecukupan pangan. Ketahanan pangan yang buruk, terutama pada ketahanan pangan keluarga miskin adalah munculnya tindakan negative seperti kriminalitas dan sejenisnya. Pemerintah dalam menghadapi permasalahan ini telah mengeluarkan kebijakan yang cepat dengan melakukan program pemulihan dan transformasi ekonomi dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus (COVID -19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang tujuannya diharapkan memulihkan kondisi perekonomian yang ada guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata di semua lini kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : *Stabilitas, Ketahanan Pangan, COVID-19*

Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam sumber daya manusia dalam setiap suku dan bangsa, dalam mencapai ketahanan pangan dibutuhkan ketersediaan pangan yang cukup dengan cara didistribusikan dengan harga yang terjangkau dan /aman untuk dikonsumsi bagi semua warga di setiap bangsa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ketahanan pangan merupakan ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Dikatakan jika sebuah

rumah tangga memiliki ketahanan pangan jika para penghuninya tidak berada di dalam kondisi kelaparan. Kebutuhan manusia akan pangan tidak bisa ditahan dan sampai saat ini masih tetap menjadi salah satu masalah yang harus diatasi oleh sektor pertanian.

Bertambahnya jumlah penduduk maka secara otomatis akan terjadi peningkatan kebutuhan akan pangan. Manusia sesuai dengan kodratnya butuh makan untuk mempertahankan dan melanjutkan hidupnya. Pertumbuhan manusia jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pangan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para pakar yang ada di Indonesia maupun di dunia Internasional, seperti proyek peningkatan pangan dan gizi, proyek diversifikasi pangan dan proyek pangan alternatif. Ketersediaan pangan sampaisaat ini tetap menjadi masalah utama untuk dimasa yang akan datang. Untuk itu, harus dicari cara dan upaya baru yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Negara Indonesia sebagai negara yang besar yang terkenal dengan sebutan negara agraris dengan sektor pertanian yang berlimpah dan juga dengan lautan yang luas ,dengan hasil ikannya yang cukup tinggi. Hal ini merupakan potensi besar dan modal bagi suatu negara dalam memakmurkan rakyatnya. Apalagi sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia mempunyai jumlah populasi penduduk yang cukup besar, sehingga membutuhkan sumber daya alam yang besar pula, terlebih terkait pangan yang juga membutuhkan pasokan yang cukup besar juga.

Pada masa pandemi Covid 19 yang dimulai pada akhir tahun 2019 yang dimulai dari luar negara Indonesia, yang kemudian lambat laun masuk ke negara Indonesia memberikan perubahan secara signifikan pada perkembangan perekonomian di Indonesia. Masuknya pandemic COVID 19 banyak memukul perekonomian rakyat Indoneisa mulai dari skala besar, menengah sampai kecil Hal ini tentu saja membuat dinamika serta stabilitas didalam mengalami kerusuhan dan kepanikan yang yang tidak menentu, Banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa menutup usahanya, dikarenakan wabah pandemik yang semakin meluas, terlebih pihak pemerintah mengeluarkan juga kebijakan-kebijakan khusus yang mendorong tertutupnya akses aktivitas kegiatan sosial, menuju hal tersebut guna membatasi penularan yang semakin meluas.

Dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan pada masa pandemik COVID - 19 secara langsung maupun tidak langsung berimbas pada siklus kehidupan masyarakat, terutama pada bidang ketahanan pangan. Salah satu contohnya adalah bidang pertanian. Pada bidang ini banyak sekali kendala-kendala yang muncul, bukan hanya pada tingkat benih, bahkan pada jalur penjualan dan distribusi serta penjualan semua mengalami kesulitan dan hambatan yang tidak bisa dibayangkan, dimana pada jalur transportasi untuk distribusi sangat terbatas dan tidak bisa kesemua wilayah seperti biasanya, akan tetapi hanya wilayah tertentu saja yang mendapat izin dari pemerintah. Tentunya hal ini sangat menyulitkan petani dan masyarakat karena sebagaimana diketahui masyarakat Indonesia sangat tergantung pada beras sebagai makanan pokok utama. Bukan hanya bahan pokok seperti beras

yang mengalami kesulitan akan tetapi bahan pangan lain seperti sayur mayor dan hasil kebun lainnya mengalami kendala yang serupa.

Adanya beberapa kejadian-kejadian diatas tentunya akan mempengaruhi ketahanan pangan di dalam masyarakat terlebih stabilitas keamanan di dalam masyarakat. Perekonomian yang semakin sulit dengan jumlah barang yang langka ,ditambah dengan harga barang yang tinggi tentunya memicu tindakan-tindakan negative termasuk munculnya perilaku kriminal yang tentunya sangat mengkwatirkan masyarat banyak. Peran ketahanan pangan disini sangat penting dan signifikan karena secara tidak langsung berpengaruh pada stabilitas didalam masyarakat terlebih pada masa COVID -19.

Salah satu tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah untuk menganalisa dan melihat secara terukur fenomena-fenomena yang muncul , dimana dan bagaimana suatu ketahanan pangan yang ada pada suatu masyarakat berpengaruh pada stabilitas dinamika kemandirian dalam masyarakat terlebih perilaku-perilaku yang menyertainya ketika pandemi COVID 19 melanda masyarakat di Indonesia . Hal ini bisa ditunjukkan dengan fenomena dengan munculnya pemicu ketidak stabilan pada ketahanan pangan salah satunya pada jalur pasokan pangan yang mengalami kendala , baik itu dari segi pengadaan , jalur distribusi, lokasi yang terbatas serta tingkat permintaan dengan harga yang tinggi yang tentunya mengancam kehidupan masyarakat , terutama masyarakat menengah kebawah atau masyarakat kecil.

Sebagaimana diketahui bahwa demi menjaga ketahanan pangan nasional dari wabah pandemik COVID -19 pemerintah mengambil langkah-langkah yang strategis demi menjaga perekonomian masyarakat agar tetap berjalan , karena itu sejalan dengan tanggung jawab pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 44 ayat (1) dikatakan bahwa :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan untuk mengatasi krisis pangan”¹

Beberapa regulasi juga dikeluarkan oleh presiden dalam rangka pemulihan ekonomi nasional salah satunya dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tentang Pembentukan komite penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal ini dikeluarkan pemerintah selain untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional sekaligus sebagai “ perisai” bagi ketahanan pangan di dalam negara , mulai dari hulu sampai dengan hilir atau boleh dibilang dari pusat sampai dengan daerah , yang selain itu bertujuan menjaga keamanan dalam bidang siklus pangan ke masyarakat juga untuk mencegah timbulnya kriminalitas keamanan di masyarakat akibat siklus pendistribusian pangan yang tidak menentu.

Metode Penelitian

Dalam membahas fenomena-fenomena yang timbul terkait dengan ketahanan

¹ Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2012 Tentang Pangan ,Pasal 44 ayat (1),hlm.20

pangan pada masa pandemic COVID 19 maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk mengetahui gambaran-gambaran yang timbul dari suatu kejadian dengan prinsip fundamen *des sein dan des Sollen* atas suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data primer dan data sekunder dimana hal itu dilakukan untuk mendukung kajian penelitian termasuk perpustakaan, bahan-bahan literatur serta peraturan-peraturan perundangan untuk menunjang dan memperkuat analisa penelitian sehingga memberikan pendekatan yang jelas, terstruktur dan edukatif.

Pembahasan

A. Pentingnya ketahanan pangan bagi masyarakat

Indonesia sebagai negara besar mempunyai potensi sumber daya alam yang tiada terkira. Sumber daya alam bukan hanya ada diatas daratan akan tetapi juga yang berada di dalam lautan memang sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani atau nelayan dikarenakan pulau-pulau yang ada di Indonesia yang cukup banyak tersebar dari sabang sampai dengan Merauke. Negara Indonesia yang mempunyai populasi penduduk salah satu yang terpadat dan terbesar di dunia tentunya mempunyai permasalahan tersendiri ,bail dari segi sosial, polotik, ekonomi, budaya serta keamanan.

Pemerintah Indonesia dalam mengayomi dan melindungi masyarakat Indonesia baik dari segi keamanan dan ekonomi dengan mengingat jumlah penduduk yang cukup banyak tentunya mempunyai persoalan khusus bagaimanan pendapatan suatu negara bisa merata dinikmati oleh seluruh rayat yang ada di bumi nusantara ini. Salah satu bentuk dukungan pemerintah Indonesia kepada rakyatnya adalah menjaga ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya penegrtian ketahanana pangan menurut Undang-undang No. 18 tahun 2012 pasal 1 (4) dikatakan bahwa :

“Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan dari tersedianya pangan yang cukup baik,baik jumlah maupun ,mutunya, aman ,beragam,bergizi,merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama , keyakinan,dan tidak bertentangan dengan budaya masyarakat untuk sehat dan aktif serta produktif secara berkelanjutan”²

Sedangkan menurut FAO Ketahanan Pangan adalah menyatakan situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan keduaakses tersebut dalam peranannya terkait denga suatu kebijakan menurut Bustanul Arifin mengatakan bahwa :

Pemerintah harus melaksanakan kebijakan pangan, yaitu menjamin ketahanan pangan yang meliputi pasokan, diversifikasi, keamanan, kelembagaan, dan

² Ibid.hlm.3

organisasi pangan. Kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan kemandirian pangan. Pembangunan yang mengabaikan keswadayaan dalam kebutuhan dasar penduduknya, akan menjadi sangat tergantung pada negara lain, dan itu berarti menjadi negara yang tidak berdaulat³. Ketahanan pada perjalanannya sangat juga tergantung pada ketersediaan pangan yang beredar di dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui ketersediaan pangan didalam masyarakat pada masa pandemi COVID -19 juga mengalami penurunan. Penurunan kesediaan pangan juga banyak dipengaruhi oleh siklus iklim dan cuaca produksi di daerah dan tentunya dengan berbagai keluhan yang disebabkan beberapa factor lainnya. Padahal ketersediaan pangan itu sendiri merupakan syarat wajib bagi ketahanan pangan di dalam masyarakat.

Beberapa faktor yang membuat ketersediaan pangan mengalami penurunan adalah alat-alat penunjang kegiatan produksi dilingkarannya petani. Pada lingkaran petani sebagai penyedia ketersediaan pangan utama mengalami kesulitan salah satu contohnya tingginya harga pestisida dan pupuk di tingkat petani dan alat produksi lainnya ditambah siklus distribusi yang tidak lancar yang mengganggu efektivitas pola tani yang kemudian berimbas kepada penyediaan hasil tani yang diproduksi dan yang nantinya akan beredar di masyarakat umum.

Selanjutnya menurut Ir. Gatot Supangkat ,MS, Kepala Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah mengatakan : “Meskipun jumlah produksi pangan saat ini tidak mengalami banyak perubahan dan masih dapat dikatakan aman, permasalahan krisis pangan tetap dapat terjadi kedepannya. Permasalahan yang paling besar terjadi pada distribusi pangan. Dengan adanya pembatasan-pembatasan, distribusi pangan menjadi lemah. Akibatnya, stok pangan tidak merata di semua daerah. Ada daerah yang mengalami defisit dan ada pula yang mengalami produksi berlebih.”⁴

Hal-hal lain yang semakin memperburuk suasana dalam bidang ketahanan pangan salah satunya adalah dimana pada saat ini banyak sekali di zaman modern ini banyak generasi muda yang merubah budaya hidup dari pola tani ke pola non tani. artinya pada zaman sekarang ini banyak sekali para petani yang usianya semakin tua untuk mengelola pertanian dan tidak sebanding dengan sumber daya tenaga kerja tani dimana banyak generasi muda keluar kampung untuk mencari pekerjaan selain bertani dan demi gaya hidup yang lebih mudah,, dan fleksible.

Bila kita melihat sejarah ke belakang pada masa orde baru menurut Wahono “Pada awal berdirinya Orde Baru, kondisi pangan di Indonesia masih mengalami keterpurukan sebagai akibat dari gagal panen yang dialami petani akibat kemarau berkepanjangan inflasi yang membubung tinggi dan kelangkaan bahan pangan. Sebagai upaya jangka panjang, pemerintah mencanangkan program revolusi hijau yang merupakan desakan dari negara-negara maju⁵. Dengan melihat masa lalu

³ Arifin, Bustanul. Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia. (Jakarta:Penerbit Buku Kompas,2011)

⁴ <https://www.umy.ac.id/ketahanan-pangan-indonesia-di-masa-pandemi> (diakses 30 April 2022)

⁵ Wahono, Francis, Kedaulatan Pangan: Agri-culture bukan Agri-business: Mensiasati Negara Lupa Bangsa dalam Francis Wahono, Dwi Astuti dan Sabiq Carebesth (eds) Ekonomi Politik Pangan.

tersebut maka keberlanjutan dan tindakan perenevtif peemerintah dalam bidang ketersediaan pangan lebih ekstensif dilakukan.

Boleh dibilang bahwa sebagian besar masyarakat petani dan nelayan dengan didukung pulau yan subur dan laut yang luas , akan tetapi juga apabila dalam pengelolaannya pada masa pandemi COVID- 19 dimana alat-alat pertanian serta infrasturktur penunjang pertanian mengalami kelangkaan dan menjadi kesulitan tersendiri dalam mengimplementasikan hasil dari sektor pertanian tersebut akan tetapi memang faktor kendala yang paling utama adalah masalah jalur distribusi dan rantai sikus pangan baik itu pada tingkat perdagangan nasional maupun internasional yang membuat sistem penyaluran dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah mengalami macet total sehingga pemerataan hasil produksi tidak merata dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut Elizabeth : “Penerapan paradigma modernisasi yang mengutamakan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian menyebabkan terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat petani di pedesaan. Berbagai proses pelaksanaan pembangunan, terutama industrialisasi, dalam jangka menengah dan panjang menyebabkan terjadinya perubahan struktur pemilikan lahan pertanian, pola hubungan kerja dan struktur kesempatan kerja, serta struktur pendapatan petani di pedesaan.”⁶

Masa pandemi COVID 19 memang memunculkan banyak fenomena yang diluar perkiraan setiap negara , tak terkecuali bagi Negara Indonesia. Hantaman keras dalam bidang kesehatan , terlebih pada bidang perekonomian membuat porak poranda sistem perekonomian yang ada. Adanya kebijakan pemerintah untuk menekan peredaran wabah virus covid 19 malah memberikan efek samping yang nyata dalam bidang perekonomian. Salah satunya adalah tentang kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang memberikan efek banyaknya pabrik dan perusahaan swasta yang tutup ,yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja secara besar besaran , yang boleh dibilang rata-rata mereka yang bekerja pada perusahaan atau pabrik tersebut adalah masyarakat yang mempunyai nilai rata-rata taingkat perekonomian menengah ke bawah.

Hal ini tentu saja ketahanan pangan pada tingkat lingkungan keluarga menjadi terganggu karena pada hakekatnya ketahanan pangan dalam rumah tangga adalah menunjukkan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan dan berikut termasuk gizi dalam rumah tangga tesebut. Ketahanan pangan dalam keluarga bisa terwujud dengan baik apabila faktor- faktor utama pendukung tercukupi , dan salah satu faktornya adalah kecukupan dalam bidang pangan. Dampak perekonomian yang merosot cukup tajam di bidang industri dan usaha mendorong tingkat pengangguran yang cukup tinggi dan terjadinya pemutusan

Kembali ke Basis: Dari Ketergantungan ke Kedaulatan Bina Desa dan Cindebooks.2011

⁶ Elizabeth, R. . Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani: Ke Arah Keberpihakan Pada Masyarakat Petani di Pedesaan yang Terpinggiran Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan. (Forum Penelitian Agro Ekonomi, 25(1),2017), 29- 42.

hubungan kerja kepada siapa saja yang dinilai kurang mendukung proses produksi. Sebanding dengan tingkat ketahanan pangan secara umum pada masa pandemi COVID -19 dimana tingkat ketahanan pangan mengalami penurunan karena disebabkan siklus distribusi yang bermasalah mulai dari hulu sampai dengan hilir ,otomatis para pelaku dunia industri harus memutar otak dalam menghadapi peristiwa tersebut demi kelanjutan usahanya

Dengan deretan siklus ketahanan pangan yang rendah di masa pandemi maka secara nyata , dan logika serta disinggungkan dengan perekonomian yang semakin rendah ,tentunya bisa memancing dan menimbulkan suatu kemaman yang tidak maksimal didalam masyarakat secara umum dan secara unit terkecil yaitu keluarga. Hal ini bisa terjadi karena dasarnya setiap mansia mempunyai kebutuhan vital yang harus dipenuhi , yaitu kebutuhan hidup dan salah satu yang terpenting adalah kebutuhan pangan.

B. Stabilitas ketahanan pangan pada sosial ekonomi masyarakat

Dalam perjalannya siklus pandemi Caovid -19 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pelaku-pelaku ekonomi, para pemerintah pusat dan para pemerintah daerah ,dan juga termasuk para pemangku kepentingan yang mau secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kondisi tersebut. Berhubungan dengan itu maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah memegang prinsip kehati-hatian karena jika salah memutuskan akan berdampak luas kepada sosial ekonomi , budaya bahkan keamanan di dalam masyarakat. Pemerintah harus peka terhadap segala perubahan -perubahan gaya hidup dan cara hidup masyarakat yang tentunya pasti akan merubah *mind set* yang berkembang dimasyarakat selama ini.

Selanjutnya Prabowo menegaskan bahwa :” Dalam hal ini secara terus menerus tanpa disadari kita telah menerapkan ekonomi sebagai seni, meskipun kita tidak mempelajari atau memahami ilmu ekonomi. Ahli dibidang pertanian, pelaku agribisnis, kepala pemerintahan setiap saat juga dihadapkan pada permasalahan ekonomi. Mempelajari penerapan prinsip-prinsip ekonomi dibidang pertanian tidak menjamin keberhasilan pengambilan keputusan ekonomi, tetapi akan memberikan pemahaman tentang proses ekonomi dan mengarahkan pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik “⁷

Perlambatan pertumbuhan ekonomi berdampak langsung bagi ketahanan pangan masyarakat. Sosial ekonomi mengalami keguncangan disemua lini sektor kehidupan di Indonesia. Banyaknya bidang Industri yang terdampak tentu mempengaruhi pangsa pasar. Biaya impor dan ekspor akibat pandemi yang langka dan tinggi semakin menurunkan tingkat produktivitas produksi di segala bidang

⁷ Prabowo, E. S., Wijayanti, T., & Saddaruddin. Analisis Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Petani Terhadap Pengetahuan Budidaya Pertanian Organik Padi Sawah (*Oryzasativa*L.) di Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan. *Jurnal Pertanian Terpadu*, 6(2),(2018) 88-95.

yang berdampak langsung pada tiap bidang kehidupan ekonomi di Indonesia. Selain itu bidang-bidang industri lainnya yang mengalami dampak langsung, yaitu di bidang industri pariwisata. Pada bidang ini yang berimbas langsung secara nyata, dikarenakan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait protokol kesehatan membawa perilaku dan cara hidup yang tidak seperti pada umumnya. *Sosial Distancing* menjadi suatu pilihan bagi mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan atau aktivitas berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya.

Memang pembatasan dengan skala besar memberikan dampak positive bagi masyarakat untuk menekan penyebaran virus COVID 19, terlebih lagi dengan adanya pembatasan pengelolaan atau jam buka terhadap beberapa kegiatan usaha, yang dimana waktu beroperasinya tidak sampai malam atau untuk pengopersian sesuai jadwal yang disampaikan oleh pihak yang berwenang mampu efektif menurunkan tingkat penularan virus COVID - 19 dan terbukti secara signifikan.

Tak heran dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pandemi ini memunculkan aksi dan reaksi didalam masyarakat. Dengan berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh George C. Edward III (Subarsono,2011:90) bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh empat variable, yaitu⁸

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Disposisi
- d. Struktur Organisasi

Artinya di salah satu sisi masyarakat ingin melaksanakan kegiatannya seperti hari hari sebelumnya seperti: berbelanja, bekerja, bermain, bekerja dan sebagainya, yang kemudian lalu mengalami perubahan dengan dikeluarkannya aturan tersebut. Dampak lainnya adalah bagaimana dengan cara hidup baru. Cara hidup baru menjadi mau tidak mau, suka atau tidak suka harus diikuti oleh semua masyarakat di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menggalakkan dan menggunakan protokol kesehatan ketat, menjaga jarak (*social distancing*), menggunakan masker, mencuci tangan.

Perubahan cara hidup baru terlihat dimana setiap kegiatan atau aktivitas selalu merujuk kepada digital On-line atau daring. Jadi bisa dikatakan bahwa porsi untuk media sosial lebih besar artinya penggunaan media on line untuk berbelanja, tatap muka sekolah, pekerjaan yang bersifat langsung semuanya bisa digunakan melalui media sosial atau daring.

Perubahan cara hidup ini secara otomatis merubah market pasar dalam segi transaksi yang biasanya antara penjual dan pembeli melakukan kontak

⁸ Subarsono,AG. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi.(Yogyakarta: PustakaP elajar.2011) hlm.90

langsung di pasar, mall atau tempat berbelanja, sekarang berubah dimana semua transaksi dilakukan di media on line atau yang termudah melalui gadget yang dimiliki hampir semua orang yang ada di Indonesia. Perubahan cara hidup ini tentunya mematikan fungsi-fungsi pasar dan mall sebagai tempat transaksi tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Kegiatan ini dilakukan dalam waktu yang tidak sebentar dimana sebagaimana diketahui bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia sekitar awal tahun 2020 yang notabene virus tersebut masuk dari luar Negara Indonesia dan beredar ke Indonesia sampai saat sekarang ini. Kejadian ini memberikan dampak langsung pada sosial ekonomi Indonesia. Jadi bisa dibayangkan apabila pada fase periode tersebut tak heran maka market pasar bidang usaha dan sektor retail mengalami penutupan secara signifikan karena pembeli beralih pada transaksi yang bersandar pada dunia maya, yang mereka lebih anggap cepat, aman dan menghemat waktu dan biaya

Karena adanya perubahan gaya hidup dan cara berbelanja maka otomatis banyak pihak usaha dalam bidang retail menutup usahanya. Hal ini tentu saja secara langsung berdampak pada sumber daya pekerja secara nyata yaitu, munculnya pemutusan hubungan Kerja (PHK) bagi para tenaga kerjanya, karena disebabkan biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima oleh para pengusaha dan ini menjadi "pekerjaan rumah tangga" bagi pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, dikarenakan menjadi semakin banyak jumlah pengangguran yang beredar di wilayah Indonesia secara bersamaan, karena kita ketahui usaha-usaha tersebut sebagian besar dikuasai oleh pihak retail dengan jumlah tenaga pekerja yang tidak sedikit jumlahnya.

Kebijakan pemerintah terkait protokol kesehatan bukan hanya berimbas pada sistem pasar atau market, akan tetapi juga berdampak pada sistem transportasi umum, yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dengan membatasi jumlah penumpang pada masa pandemi COVID-19 pada tiap-tiap kendaraan. Dengan adanya sistem pembatasan penumpang bagi tiap kendaraan semakin mempersulit para pelaku transportasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perekonomian rakyat, yang semakin sulit, dimana bagi orang-orang dengan ekonomi terbatas dengan *skill* serta kemampuan modal yang minim cenderung akan melakukan perbuatan kearah tindakan yang negatif atau kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, terlebih bagi mereka yang telah mempunyai tanggungan keluarga.

Bentuk-bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, bentuk pembatasan dalam memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yakni: a) peliburan sekolah dan tempat kerja; b) pembatasan kegiatan keagamaan; c) pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum; e) pembatasan

moda transportasi; dan f) pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan, disertai ancaman sanksi bagi yang melanggar.⁹

Sedangkan pada bisnis restoran dan perhotelan yang juga merupakan bisnis yang mempunyai tenaga kerja cukup banyak, juga terkena dampak yang cukup signifikan. Sebagaimana diketahui Indonesia merupakan gugusan pulau-pulau yang mempunyai banyak pulau dan lautan yang indah yang tentunya sangat menunjang bagi sektor pariwisata dan itu terbukti dengan banyaknya berdiri resort dan hotel-hotel serta restoran yang tersebar di hampir seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tentu saja dengan panorama Indonesia yang Indah banyak investor yang menanamkan uang dan modalnya pada bisnis tersebut, baik dari investor lokal maupun internasional dengan jumlah modal yang tidak sedikit dan sumber daya manusia yang cukup tinggi pula, Boleh dibilang salah satu andalan mengapa sektor pariwisata menjadi suatu andalan bagi tamu mancanegara atau turis yang datang dikarenakan Indonesia terkenal dengan Pulau Bali dengan tariannya dan Raja Ampat di Papua dengan destinasi pemandangan lautnya serta Lombok di Nusa Tenggara Barat dengan keindahan alam serta faunanya.

Perubahan “wajah” bidang sektor pariwisata berubah drastis dengan munculnya penyebaran wabah virus COVID -19 yang secara signifikan memporak-porandakan bisnis pariwisata tersebut. Hal itu bisa terlihat dari sepi pengunjung atau turis yang berkunjung masuk ke Indonesia dikarenakan kebijakan pelarangan dari Negara warganegara asing untuk keluar dari negaranya dikarenakan di negaranya pun terdampak wabah COVID -19. Selanjutnya yang tak kalah telak adalah dari segmen bisnis restoran atau kuliner, dimana pada usaha atau bisnis tersebut banyak yang “gulung tikar” dikarenakan pembatasan tertentu untuk kegiatan tersebut dan untuk perhotelan tidak ada bedanya mengalami penurunan untuk *occupancy* kunjungan kedatangan yang semakin turun dengan drastis dan tentu saja ini semua menggelisahkan para pekerja di tempat tersebut, akan tetapi pemilik modal pun akhirnya henggang kaki atau menutup usahanya tersebut dan ini merupakan hal terburuk bagi semua sector industri, terutama bidang pariwisata .

Memang tidak mudah bagi pemerintah untuk mengembalikan keadaan perekonomian yang sudah porak-poranda .Kerjasama dengan berbagai pihak yang sinergi antara rakyat , pemangku kepentingan dan serta kebijakan yang tepat diperlukan untuk itu ,demi pemulihan dan transformasi ekonomi yang lebih baik. Akan tetapi ada faktor-faktor lain yang perlu dipikirkan pemerintah guna menuju untuk itu . Salah satunya yang perlu dipikirkan adalah pada bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan dimana pemerintah sangat *concern dan fundamental* , dikarenakan pada bidang ini merupakan cikal bakal pengembalian pertumbuhan ekonomi kearah lebih baik. Pemerintah Indonesia sebagaimana diketahui banyak mengganggu

9 Riant Nugrohoetal., Dampak Covid-19 Pada Ekonomi: Pendekatan Strategi Ketahanan Pangan (Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan, 2020), hlm.6.

biaya untuk melakukan tindakan preventive dan rehabilitasi bagi korban COVID -19 . Salah satu program pemerintah dalam rangka pemulihan ekeonomi melalui bidang kesehatan. yaitu salah satunya dengan melakukan tindakan vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia yang pada awal vaksinasi dimulai dari tenaga kesehatan, TNI dan POLRI serta lembaga pemerintah lainnya yang berkompeten untuk itu dan petugas kesehatan lainnya yang bersinggungan langsung dengan kepentingan publik.

Pemerintah dalam usaha memulihkan perekonomian mendasarkan pada bidang kesehatan terlebih dahulu sebagaimana yang diutarakan sebelumnya menggalakkan peran vaksinasi sebgai garda depan penanggulangan COVID- 19 yang semakin merajalela dan banyak memakan korban baik dari anak sampai dengan dewasa dengan tidak memandang staus dan kedudukan . Efek dari pandemi COVID -19 dimana jumlah korban yang cukup banyak , bahkan realita yang muncul untuk korban pasien COVID -19 pasien korban COVID -19 tempat pemakamannya dibuat khusus. Demikian juga perlakuan untuk korban pasien Covid 19 itu sendiri pun ditangani sebagai pasien dengan kategori karantina dan penanganan tersendiri dalam pengurusan ketika akan dimakamkan dengan protokol kesehatan tertentu.

Dalam menggalakkan vaksinasi memang dibutuhkan sosialisasi yang komprehensif karena pemahaman semua orang tentang manfaat dan dampak dari vaksinasi belum merata kesemua lapisan masyarakat. Sosialisasi yang intens dan fleksibilitas diperlukan karena untuk mempercepat implementasi vaksinasi di lapangan oleh tenaga kesehatan . , karena sebagaimana diketahui populasi penduduk di Indonesia yang cukup padat dan penyebarannya di berbagai pulau yang ada di Indonesia tentunya membutuhkan perhatian tersendiri dan *treatment* khusus agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan merata.

Demografi negara Indonesia dimana terdapat beberapa pulau di propinsi yang masih terbelakang atau masih tertinggal dari struktur sarana dan prasarana pembangunan yang terbatas tentunya akan menyulitkan distribusi tindakan preventive , terutama vaksinasi di suatu daerah yang tentu saja akan menjadi tantangan tersendiri untuk tindakan preventive dan pemulihan kesehatan akibat dampak penyebaran COVID -19 di wilayah tersebut. Peran pemerintah daerah harus cepat menanggapi hal tersebut dan ini merupakan masalah yang serius ,dimana apabila terjadi penyebaran di wilayah tersebut maka tindakan yang bersifat rehabilitative akan semakinsemakin sulit, untuk itu maka diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah bergandeng bersama dengan masyarakat dalam penyelesaian wabah pandemi tersebut sehingga diharapkan gejala-gejala wabah pandemi COVID -19 bisa terdeteksi dengan cepat sehingga meminimalisir korban jiwa yang akan timbul.

Dukungan dari masyarakat pada program pemerintah saat ini memang sangat diperlukan, artinya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk saling bersatu padu dengan semangat kebersamaan menghadapi COVID-19 untuk meminimalisir penyebaran virus ini memang sangat diperlukan. Saat ini memang telah ada langkah-langkah dari pemerintah untuk menurunkann tingkat penualaran seperti

sosialisasi pengetahuan tentang pentingnya penggunaan masker, pengetahuan tentang pentingnya menjaga jarak ketika berbicara dan pentingnya mencuci tangan ketika berhubungan dan segala sesuatu yang berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya ketika mereka berinteraksi

Penggunaan media sosial atau perlengkapan teknologi informasi lainnya didayagunakan oleh pemerintah untuk memaksimalkan informasi dan penanganan COVID-19 kepada masyarakat, yang mana diharapkan nanti masyarakat akan patuh dan sadar diri dalam menjalankan protokol kesehatan dengan begitu diharapkan tercipta *Heard Community* di kalangan masyarakat, sehingga apabila tercipta imunitas bersama maka roda perekonomian dapat berjalan dan berputar dengan baik, serta pertumbuhan ekonomipun akan stabil sehingga stabilitas keamanan dan ketahanan dalam segala aspek akan kembali normal sebagaimana semula.

Sebagaimana diketahui regulasi-regulasi terkait pemulihan dan transformasi ekonomi dan bidang-bidang lainnya telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk saat ini. Salah satu contohnya adalah pembukaan kawasan pariwisata dengan kapasitas terbatas, pembukaan resoran dengan jam terbatas, dan beberapa bidang transportasi dengan jadwal dan kegiatan yang semua terbatas. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa beraktivitas dengan baik dan lancar, akan tetapi tetap memegang teguk protokol kesehatan guna mencegah penularan virus berkembang di sekitarnya. Terlebih hal itu dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menggairahkan lagi bisnis-bisnis yang telah "tidur" akibat wabah pandemi COVID-19 akibat dampak regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebelumnya kepada bidang usaha atau bidang industri tersebut. Dalam perannya kebijakan yang diambil pemerintah merupakan salah satu Langkah kebijakan public dalam menangani suatu permasalahan yang timbul. Sebagaimana dikatakan oleh Agustino, bahwa implementasi kebijakan sederhana adalah; "Implementasi kebijakan adalah sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan"¹⁰

Tidak mudah untuk membangun kembali sektor Industri atau sektor usaha yang telah "tidur" cukup lama, karena butuh rencana atau *plan* khusus bagaimana strategi yang tepat dengan melihat kepentingan public dan lingkungan yang ada. Para pelaku usaha ingin kembali membuka usahanya, karena dengan melihat pengalaman terdahulu mereka melihat iklim usaha apa yang cocok untuk dikembangkan yang mempunyai nilai profit dengan melihat potensi lingkungan dengan cara pandang yang berbeda. Dampak dari segi sosial ekonomi memang berimbas kepada semua pelaku usaha, tak terkecuali masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Pelaku Industri serta masyarakat umum. Banyak para pelaku usaha terpaksa meninggalkan usahanya dan beralih ke bidang usaha lain yang dampaknya secara

10 Agustino, Leo. Dasar-dasar Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm.126

bisnis lebih menguntungkan baik dari profit ,maupun dari segi permodalan dan *progress proyeksi* bisnis di masa mendatang,

Efektivitas stabilitas ketahanan pangan dapat terjalin dengan baik apabila pertumbuhan ekonomi, kesediaan pangan berjalan dengan lancar dan baik sebagai siklus rantai distribusi makanan yang bergerak tanpa hambatan dan mencapai pada sasarannya. Daya gerak dan daya pacu masyarakat yan berkembang dengan maju mobilitas yang tinggi dan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah merupakan dasar bagaimana kondisi ini dengan cepat terselesaikan. Faktor-faktor penghambat dalam penanganan COVID -19 baik secara langsung maupun tidak langsung ,seperti kurangnya sosialisasi pada masyarakat terkait bahaya virus COVID-19, Penggalangan pentingnya vaksinasi atau distribusi vaksin yang terlambat ke daerah –daerah terpencil dikarenakan infrastuktur sarana adan prasarana yang kurang memadai merupakan hal-hal yang harus segera ditangani dengan segera untuk mempercepat perbaikan kualitas kesehatan masyarakat, dikatrenakan apabila kualitas kehidupan masyarakat pulih dan terangkat ,maka pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pada masyatraklat akan cepat juga kembali seperti semula.

Pemulihan ekonomi secara bertahap memang dimulai secara bertahap oleh pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya kelonggaran kepada setiap masyarakat untuk beraktivitas di luar . Dalam usaha pemulihan ekenomi nasional dikeluarkanlah Peraturan presiden No. 82 tahun 2020 Tentang Komite Penangan Corona Virus Desease 19 (Covid 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Terbentuknya komite ini untuk memastikan bahwa penanganan virus Covid 19 ini bisa tertangani , sekaligus pemulihan ekonomi yang dilakukan secara terpadu dan beriringan , karena belajar dari negara tetangga yang terlebih dahulu terkena wabah pandemi COVID- 19 bahwa persoalan tersebut tidak bisa dipisahkan satu persatu, akan tetapi harus diselesaikan dengan sejalan beriringan memberikan dampak penyelesaian yang maksimal bagi masyarakat baik dari segi kesehatan maupun dari segi perekonomian yang tujuannya keduanya berjalan dengan baik serta seirama.

Selanjutnya menurut Galih Nugraha menjelaskan ada empat akar permasalahan pada distribusi panganyang dihadapi:

- 1) Dukungan infrastruktur, yaitu kurangnya dukungan akses terhadap pembangunan sarana jalan, jembatan dan lainnya
- 2) Sarana transportasi,yakni kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat didalam pemeliharaan sarana transportasi kita,
- 3) Sistem transportasi, yang dianggap masih kurang efektif dan efisien. Selain itu juga kurangnya koordinasi antara setiap moda transportasi mengakibatkan bahan pangan yang diangkut sering terlambat sampai ketujuan,
- 4) Masalah keamanan dan pungutan liar, yakni pungutan liar yang dilakukan oleh preman sepanjang jalur transportasi diIndonesiamasih seringterjadi.¹¹

¹¹ Nugraha, Galih.2009.Meningkatkan Ketahanan Pangan Indonesia berbasis Sumber Daya Lokal. Sumber:<http://www.nugrohogalih.wordpress.com/2009/02/06/meningkatkan-ketahanan->

Pemulihan ekonomi terkait dengan ketahanan pangan bagi masyarakat juga dipengaruhi oleh adanya ketersediaan pangan yang ada dan beredar didalam negara, terutama terkait kuantitas dan kualitas yang ada. Faktor iklim atau cuaca juga sangat mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa Negara Indonesia adalah negara tropis dengan salah satu dengan curah hujan yang cukup tinggi di beberapa daerah. Beberapa daerah pertanian yang sebagai penyumbang lumbung beras dan sayur-sayuran kadang diterpa iklim yang kurang mendukung ketika dalam masa pandemi yang membuat hasil pertanian maupun hasil kebun mengalami kerugian yang tidak sedikit ditingkat petani sehingga pasokan hasil tani kepada masyarakat berkurang.

Pada masyarakat kota yang tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam dikarenakan lahannya sudah menjadi gedung-gedung tinggi atau perkantoran yang tentu saja tergantung dengan hasil pertanian atau perkebunan dari para petani, dan dengan pasokan kurang dengan populasi penduduk kota yang padat merupakan masalah tersendiri bagi wilayah tersebut. Salah satunya mengapa pencapaian dalam pengananan pemulihan ekonomi secara berkesinambungan mengalami kendala sehingga memang diperlukan strategi khusus dalam menangani hal tersebut Usaha. dalam pemenuhan kebutuhan pangan dari hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di masa pandemi membuat pemerintah mengambil kebijakan khusus, salah satunya pemulihan dan transformasi ekonomi.

Sebagaimana salah satu tindakan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus (COVID 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Pasal 8 tentang Satuan Tugas dan Transformasi Ekonomi Nasional sbgaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas¹²:

- a. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional
- b. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, termasuk permasalahan yang dihadapi sektor-sektor usaha riil secara cepat dan tepat
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional dan
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan dan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional

Pada negara-negara berkembang memang akibat pandemi yang ditimbulkan cukup terasa berbeda dengan negara maju. Hal itu bisa terjadi jika keuangan pada negara tersebut tidak mampu menanggulangi penurunan investasi, produksi dan ekspor, kemampuan dan kesigapan pemerintah ketika wabah virus itu

pangan-indonesia-berbasis-sumber-daya-lokal.htm

¹² Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus (COVID 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Pasal 8 tentang Satuan Tugas dan Transformasi Ekonomi Nasional sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf c

melanda di negara mereka. Pada negara berkembang lebih fleksibel dalam bidang perekonomian apabila ditopang dengan permodalan dan keuangan yang kuat dan tepat ditunjang dengan kebijakan dan regulasi yang cepat, tepat dan terarah tentunya akan memberikan dampak yang positive bagi perekonomian sehingga bisa cepat terhindar dari krisis ekonomi.

Peran pemerintah dengan memberikan stimulus yang sesuai dan terarah kepada masyarakat di tunjang dengan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap segala kebijakan regulasi pemerintah termasuk pemangku kepentingan maka dapat dipastikan pada kondisi pandemi dapat ditemukan jalan keluar yang baik, sehingga unit-unit usaha pada bidang sektor industri atau bidang lainnya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pencanangan program-program pemerintah yang aktive dan realistis menjadi sorotan utama masyarakat dalam menentukan langkah hidup ke depan dan menjadi panutan dalam berkehidupan sehari hari sesuai dengan tujuan dalam program tersebut.

Bila dilkaji secara komprehensif pemerintah telah mengusahakan perbaikan ekonomi secara komprehensif terbukti dengan dikeluarkannya BantuanLangsung Tunai (BLT) bagi para kalangan menengah kebawah yang terimbas langsung akibat pandemi COVID 19, karena sebagaimana diketahui kalangan tersebut itulah yang terpapar langsung ekonominya akibat COVID 19 tersebut.

Lingkaran krisis ekonomi memang tidak bisa dihindarkan pada masa pandemi COVID 19 yang dimana semua struktur kehidupan dan pertumbuhan ekonomi mengalami gangguan yang signifikan, akan tetapi di sisi lain juga menimbulkan bentuk-bentuk usaha kreatif yang muncul akibat dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID -19. Dengan di terapkannya pembatasan dalam beraktivitas melalui protokol kesehatan, geliat aktivitas dinamika kehidupan bisa berjalan walaupun bergerak secara bertahap dan perlahan

Salah satu bentuk ekonomi kreatif pada maasa pandemi covid 19 banyak bermunculan di kalangan tua maupun muda, salah satu usaha yang muncul dari hal tersebut adalah budidaya tanaman hias, peternakan ikan hias dengan memanfaatkan pemasarannya melalui media sosial dan termasuk *conten creator* untuk dalam pembuatan *You Tube*, hal-hal seperti ini muncul karena keterpaksaan keadaan yang membuat mereka kreatif mencari jalan keluar, dikarenakan sumber-sumber penghasilan mereka yang bekerja pada sektor industri mengalami penutupan masal, Kegiatan yang dilakukan sebageian masyarakat tersebut secara nyata membantu mereka melewati krisis ekonomi yang diakibatkan pandemi yang tidak berkesudahan samapai saat ini.. Dengan berbagai munculnya ekonomi kreative ini, pemerintah harus cepat tanggap dalam melihat fenomena ini sebagai alternative pemenuhan ekonomi yang mendukung pembangunan perekonomian yang terhambat karena pandemi COVID-19. Begitu pula dengan terbukanya peluang-peluang usaha untuk mendapatkan penghasilan, mengurangi beban pemerintah dalam mensiasati pengangguran yang muncul karena wabah pandemi COVID-19 ini..

Sosial ekonomi masyarakat pada masa pandemi covid 19 memang kurang begitu baik, akan tetapi dengan langkah pemerintah mengakomodir peluang-peluang ekonomi dan cepattanggap dalam transformasi ekonomi bisa membuka kajjalan bagi peluang-peluan bentuk ekinomi kreative lainnya, baik itu yang berbasis on line atau yang bersifat lebih praktis . Peran langsung pemerintah pusat dan daerah yang menjadi tolak ukur klemajuan masyarakat dalam mengembangkan usahanya sangatv diperlukan , selai itu pemerintah harus berperan aktive melakukan pengembangan trehadap ekonomi kreative tersebut m termasuk permodalan dan pelatihannya lainnya guan menjang dan mendukung bentuk usaha tersebut.

Dampak sosial ekonomi berimbas langsung pada dampak sosial budaya masyarakat. Dampak itu terlihat pada masyarakat dalam beraktivitas baik dalam beribadah maupun dalam berkomunikasi. Pembelajaran tatap muka sangat dibatasi dan pembelajaran lewat daring atau on- line menjadi pilihan utama karena dianggap lebih efesien , menghemat waktu dan lebih aman. Kegiatan silaturahmi antar kelompok masyarakat yang kurang membawa kepada individulisme masing-masing manusia. Himbauan untuk tidak berkumpul bersama kegiatan tertentu makin menimbulkan tingkat stress yang tinggi di masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa budaya masyarakat Indonesia mayoritas adalah tegur sapa dan silaturahmi . Begitu dengan adanya musibah pandemi COVID- 19 ini secara langsung memukul tingkat psikologis atau stress yang lebih dalam dikarenakan sebelumnya terkena masalah ekonomi dan masalah lainnya yang diakibatlan pandemi ini.

Untuk itu kebutuhan akan pemenuhan spritual pribadi masing-masing orang untuk pergi masjid atau rumah ibadah lainnya sangatlah perlu guna menimalisir tingkat tekanan secara psikologis dengan menerapkan protokol kesehatan COVID -19. Dengan adanya pemenuhan tersebut diharapkan tingkat kriminalitas atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam rumah tangga yang disebabkan oleh kesulitan akan ekonomi bisa diminimalisir. Sebagaimana di ketahui tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada masa pandemi COVID-19 cuklup tinggi hal ini disebabkan karena rata-rata faktor ekonomi yang tidak stabil . Adapun perubahan –perubahan cara hidup baru ini pastinya akan berlangsung dalam jangka waktu yang yang tidak sebentar, untuk itu maka diperlukan suatu keserasian antara pemerintah dan masyaralat untuk maju bersama menangani hal ini.

C. Ketahanan pangan sebagai tolak ukur keamanan dalam masyarakat

Ketahanan pangan atau lebi dikenal dengan *food security* merupakan hal yang penting bagi suatu negara. Ketahanan pangan mempunyai fungsi yang strategis dalam masyarakat. Fungsi ketahanan pangan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya , baik dari lingkungan domestik maupun lingkungan internasional. Ketidak pastian dan ketidak stabilan suatu ketahanan pangan yang dipengaruhi dari kedua lingkungan tersebut bisa berdampak langsung pada sistem ketahanan pangan yang ada.

Menurut Didit Hendrawan mengatakan ,”keberadaan ketahanan pangan

dengan ketersediaan pangan merupakan salah satu urgensi dari sebuah Negara untuk dapat menciptakannya. Hal tersebut dilatarbelakangi ketahanan pangan suatu Negara dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan bernegara seperti ekonomi, politik sosial bahkan budaya. Oleh karena itu, tindakan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat oleh Negara merupakan sebuah isu global bukan hanya isu sebuah negara semata dan mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan pangan dari sebuah pemerintahan”¹³

Sebagai mana diketahui ada 4 (empat) sub sistem ketahanan pangan antara lain :

- a. Ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untukseluruhpenduduk,
- b. Distribusipanganyanglancar danmerata,
- c. Konsumsipangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang, yang berdampakpada
- d. Status gizi masyarakat

Jadi disini dapat disimpulkan bahwa aspek ketahanaangan bukan semata-mata di tinjau dari aspek produksi, distribusi dan ketersediaan pangan akan tetapi juga menyangkut aspek mikro antara lain ketersediaan gizi dan nutrisi dalam lingkungan rumah tangga , termasuk keluarga miskin serta ibu hamil dan anak-anak.

Dalam masa pandemi COVID-19 segala aspek bidang mengalami penurunan yang sangat drastis. Perekonomian terpuak dengan begitu kerasnya sehingga mencapai titik terendah dengan dibuktikannya banyak perusahaan yang gulung tikar, pengangguran tersebar diaman-mana, sistem transportasi terganggu, bisnis hotel dan pariwisata mengalami penurunan. Kunjangan wisata turis , baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara ke Indonesia berkurang, bahkan investor-investor asing yang menanamkan modalnya ke dalam negeri terpaksa harus mengalami kerugian yang tidak sedikit.

Musibah nasional ini tentu saja berdampak cepat sekali pada sistem ketahanan pangan di Indonesia. Salah satunya yang sangat menonjol adalah tentang distribusi pangan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia. Ketersediaan pangan d pada masa pandemi COVID-19 mengalami gangguan dan ini sangat terlihat dikarenakan distribusi pangan dan produksi pangan mengalami kendala yang diakibatkan efek domino dari sistem atau siklus distribusi tersebut , dimana didalam sistem distribusi itu adanya transportasi atau pengangkutan. Dalam sistem ini pengaruh yang ditimbulkannya cukup besar dimulai dari harga pengangkutan yang naik harga sumber daya manusia atau tenaga kerja yang beranjak tinggi dan ketidakpastian terhadap alat-alat penunjang distribusi dan produksi dikarenakan penyediaan perusahaan alat-alat untuk kegiatan produksi tersebut banyak yang

¹³ ,Hendriawan, Didit, Kedaulatan Pangan Maritim, Dinamika dan Problematika,(Jakarta:Beta,2016) hlm.2

terlambat, sudah tutup dan atau sudah tidak berproduksi lagi dikarenakan wabah COVID-19 ini.

Kombinasi dari ketahanan pangan yang menurun ditambah ketidakseediaan pangan yang tidak merata diberbagai daerah diakibatkan perekonomian yang tidak stabil serta lapangan kerja yang banyak yang tidak berproduksi, bisa memunculkan tingkat kriminalitas di dalam masyarakat. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Yusri Yunus ia mengatakan “ memang pada masa pandemi Covid 19 ini ada beberapa-beberapa kejadian yang sempat mengalami peningkatan ”¹⁴ walaupun tidak merinci kenaikan prosentase dengan jelas kejahatan apa yang mengalami peningkatan di masa pandemi covid 19 terjadi.

Kemudian untuk kecukupan pangan nasional tidak menjamin semua lingkungan rumah tangga atau kepala keluarga mendapatkan kebutuhan apa yang diperlukannya pada masa pandemi ini. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah yang mendorong pemberdayaan dan pemulihan transformasi pada bidang ekonomi, terutama pada bidang pangan sehingga diharapkan pada tingkat keluarga dan masyarakat mendapatkan nilai ketahanan dan keamanan itu sendiri dimana mereka mampu meolong dirinya sendiri dan mewujudkan ketahanan pangan dari masalah -masalah pangan yang akan datang dan dihadapi nantinya.

Selanjutnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, dalam hal ini otonomi daerah dengan berkordinasi dengan pemerintah pusat seyogyanya mengeluarkan perda yang mendukung kemandirian stabilitas ekonomi daerah. Seorang pakar otonomi daerah I Gde Pantja Astawa mengatakan ;“Kemandiriantersebut memiliki arti bahwa daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengaturdaerahnya. Kewenangan tersebut adalah kewenangan yang dimiliki daerah untukmenentukan kebijakan pengurusan daerah dalam sebuah aturan yang selanjutnyadisebutperaturandaerah”¹⁵

D. Beberapa bentuk upaya dalam stabilisasi ketahanan pangan dalam masyarakat pada masa pandemi COVID -19

Dalam upaya mendorrong percepatan dan transformasi ekonomi pemerintah melakukan beberapa hal yaitu dikeluarkannya regulasi maupun kebijakan perekonomian yang lebih fleksible dan cepat. Selain itu pula pemerintah telah mengusung beberapa program seperti Bantuan Languing Tunai (BLT) terkait dampak krisis ekonomi akibat wabah pandemi COVID-19. Selain itu pemerintah juga menyalurkan bantuan stimulus bagi UMKM, Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi wijono Moegiarso “Pemerintah berupaya menyediakan sejumlah stimulus melalui kebijakan

14 <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/05/19000421/polda-metro-jaya-angka-kriminalitas-naik-selama-pandemi-covid-19> (diakses 30 April 2022)

15 Astawa, I Gde Pantja *Problematika Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2009) hlm 294

restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya,"¹⁶

Program pengembangan UMKM pada masa pandemi dianggap pilihan yang tepat bagi pemerintah, dimana mengingat sudah banyak diluar sana tenaga kerja yang mengganggu karena lapangan kerja yang tutup. Selain itu dengan adanya UMKM ini sedikit banyak merupakan pilihan yang tepat dalam membantu pemerintah dalam rangka menstabilisasi ketahanan pangan yang turun akibat wabah pandemi. Selain itu pula juga sekaligus tidak secara langsung sebagai rantai pengaman dalam meminimalisir tingkat konflik dalam masyarakat dan berfungsi sebagai tindakan preventive keamanan terhadap kejahatan yang akan timbul di kemudian hari. Program UMKM dan ekonomi kreatif pada implementasinya sudah terbukti mampu mencukupi dan bertahan pada situasi yang sulit, akan tetapi perlu adanya gagasan atau ide ide baru yang perlu dikembangkan termasuk penggunaan media on-line dalam pemasarannya. UMKM dipandang mempunyai ketahanan yang relative kuat dalam menghadapi krisis. Sejalan dengan itu menurut Rio dan Susilawati bahwa "hal itu terlihat dari sejarah bahwa kegiatan UMKM di Indonesia dapat bertahan dan berkembang, bahkan menjadi penyelamat untuk pemulihan ekonomi pada masa berlaku krisis ekonomi dunia tahun 1998"¹⁷

Media on line merupakan sarana yang efektif dimana dikatakan oleh Irwansyah bahwa;" Media *online* disebut juga dengan digitalmedia adalah media yang tersaji secara *online* di internet. Pengertian media *online* secara umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks,foto,video,dansuara"¹⁸.Untuk itu maka banyak jenis media on line seperti what up, twiter , dan sebagainya bisa dipergunakan untuk mempromosikan hal tersebut. Selanjutnya menurut Wulan para pelaku UMKM akan lebih diarahkan pada digital, tidak lagi bermain pada tataran konservative tetapi harus dapat melihat peluang digital sehingga dapat menysasar pada pasar yang lebih luas.¹⁹

Selain itu pula pemerintah diminta bertindak cepat dalam dalam memutuskan suatu terobosan atau temuan positif dalam bidang UMKM seperti yang dikatakan oleh Saciptp Rahardjo bahwa dalam teori Hukum Progresifnya bahwa "hukum progresife adalah adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai terobosan"²⁰

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kestabilan dalam katahanan pangan maka perlu penguatan dalam

¹⁶ <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi> (diakses 30 April 2022)

¹⁷ Wilantara,F.Riodan Susilawati,"Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM",(Bandung:PT Refika Aditama,2016),hlm.331.

¹⁸ Irwansyah.Corporateand Marketing Communication.(Jakarta:Puskombis Universitas Mercu Buana,2011)

¹⁹ Wulan Ayodya,"UMKM4.0Strategi UMKM Memasuki Era Digital",(Jakarta :PT Elex Media Komputindo,2020)hlm.28

²⁰ Rahardjo. Satjipto,"*Membedah Hukum Progresif*",(Jakarta : Kompas, 2007) hlm. 154.

bidang UMKM dan usaha kecil mandiri lainnya. Tujuannya adalah agar pertumbuhan zona ekonomi di seluruh Indonesia berada pada zona positif, untuk itu pemerintah mendorong usaha mikro, usaha kecil dan menengah sebagai motor ekonomi rakyat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional

Peran UMKM sebagai pilar punggung salah satu solusi dalam pandemi bisa menjadi tolak ukur bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan bersama-sama pilihan yang terbaik, dimana populasi penduduk Indonesia diketahui bersama sebagian masih banyak berada pada garis menengah ke bawah dan dengan adanya program tersebut sangat membantu mereka dalam menyambung hidup sehari-hari dan khususnya lingkungan keluarga yang berada pada taraf kemiskinan. Bila dilihat UMKM secara komprehensif jika diperhatikan dalam pengembangan percepatan serta pemulihan ekonomi nasional mempunyai peran yang vital, yaitu ::

- a. Pelaku Bisnis UMKM banyak tersebar di perkotaan, pedesaan bahkan daerah tertinggal sekalipun
- b. Kualitas dan kreativitas UMKM berpotensi membuka lapangan kerja baru serta sebagai sumber pendapatan
- c. Bisnis UMKM paling banyak adalah sektor pertanian dan Peternakan sehingga sebagai aset dalam pembangunan Ketahanan Pangan Negara
- d. Para pelaku UMKM tidak menuntut pendidikan yang tinggi sehingga siapapun bisa ikut dalam program ini
- e. Pada waktu terjadi krisis global tahun periode 1997/1998 dimana terjadi krisis ekonomi besar-besaran hanya UMKM lah yang mampu bertahan
- f. Fleksibilitas jenis usaha UMKM sangatlah tinggi dan beragam.

Penutup

Peran ketahanan pangan dalam fungsinya mempunyai nilai yang sangat vital bagi masyarakat di suatu negara. Kebutuhan akan pangan bagi setiap orang adalah hal pokok, terutama pada ketahanan lingkungan keluarga. Ketahanan pangan pada prinsipnya sangat tergantung pada pengaruh lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan domestik maupun lingkungan internasional.

Pada masa pandemi yang melanda negara Indonesia dimana semua aspek kehidupan mengalami porak-poranda. Salah satu yang terasa dari dampak musibah besar wabah pandemi COVID-19 adalah tingkat perekonomian yang mengalami keterpurukan. Keterpurukan itu bisa terjadi karena adanya hambatan pada jalur produksi dan distribusi yang disebabkan efek domino dari dikeluarkannya kebijakan-kebijakan serta regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penekanan terhadap penularan wabah pandemi COVID-19 di tanah air. Dampak regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berakibat banyak ditutupnya usaha pada bidang produksi, pariwisata, restoran dan ini tentu saja meninggalkan jejak banyaknya pengangguran di berbagai wilayah.

Stabilitas ketahanan pangan bukan semata-mata bukan hanya pada faktor

distribusi dan produksi petani akan tetapi secara makro kesediaan jumlah pangan sangat menentukan kehidupan di masyarakat. Apabila kesediaan pangan terganggu dan terlebih kesediaan pangan terkendala bisa memunculkan efek konflik di dalam masyarakat, dimana mereka sendiri sudah tidak mempunyai sumber penghidupan akibat dampak COVID-19 untuk ketahanan pada lingkup keluarga dan secara otomatis maka tingkat kriminalitas akan semakin tinggi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) akan semakin meningkat. Untuk itu maka Ketahanan pangan sebagai tolak ukur stabilitas kehidupan masyarakat bagi keamanan dalam masyarakat secara tidak langsung sangatlah vital.

Peran pemerintah dalam mengatasi hal ini telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan regulasi untuk mendukung agar ketahanan pangan bisa kembali dengan baik. Salah satunya dengan membentuk Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus (COVID -19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang mana diharapkan dengan adanya pembentukan komite ini membawa angin perubahan percepatan dan transformasi ekonomi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Arifin, Bustanul .*Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas,2011
- Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung :Alfabeta,2016
- Astawa, I Gde Pantja *Problematika Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung:Alumni,2009
- Elizabeth, R Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani: Ke Arah Keberpihakan Pada Masyarakat Petani di Pedesaan yang Terpinggiran Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan. (Forum Penelitian Agro Ekonomi, 25(1),2017), 29– 42.
- Hendriawan, Didit, *Kedaulatan Pangan Maritim, Dinamika dan Problematika*, Jakarta:Beta,2016
- Irwansyah.*Corporate and Marketing Communication*. Jakarta:Puskombis Universitas Mercu Buana, 2011
- Rahardjo. Satjipto,*Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2007
- Riant Nugrohoetal., *Dampak Covid-19 Pada Ekonomi:Pendekatan Strategi Ketahanan Pangan*, Jakarta:Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan,2020
- Subarsono,AG.*Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2011
- Wilantara,F.Rio dan Susilawati, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*, Bandung:PT Refika Aditama,2016
- Wulan Ayodya,“*UMKM4.0 Strategi UMKM Memasuki Era Digital*”, Jakarta : PT Elex Media Komputindo,2020
- Wahono,Francis.,*Kedaulatan Pangan: Agri-culturebukan Agri-business: Mensiasati Negara Lupa Bangsa dalam Francis Wahono, Dwi Astuti dan Sabiq Carebesth (eds)*

Ekonomi Politik Pangan. Kembali ke Basis: Dari Ketergantungan ke Kedaulatan.. Bina Desa dan Cinde books.2011

Peraturan

Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus (COVID 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Jurnal

Prabowo, E. S., Wijayanti, T., & Saddaruddin. Analisis Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Petani Terhadap Pengetahuan Budidaya Pertanian Organik Padi Sawah (*OryzasativaL.*) diKelurahan Makroman Kecamatan Sambutan. *Jurnal Pertanian Terpadu*, 6(2),(2018)88-95.

Internet

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/10/08/langgar-prosedur-keselamatan-nakhoda-kapal-pengayoman-iv-tersangka>, Diunduh Tanggal 19/06/2022, Jam 16.06 WIB.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/05/19000421/polda-metro-jaya-angka-kriminalitas-naik-selama-pandemi-covid-19> (diakses 30 April 2022)

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi> (diakses 30 April 2022)